

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peran hutan sebagai paru-paru dunia sangat penting bagi keseimbangan ekosistem. Luas hutan yang semakin berkurang memiliki dampak buruk pada keseimbangan ekosistem yaitu perubahan iklim, pemanasan global, hilangnya habitat flora dan fauna yang dapat menyebabkan kepunahan, banjir, tanah longsor, erosi tanah, dan penurunan kualitas udara. Dikutip dari databoks.katadata.co.id (2022), menurut Badan Pusat Statistik (BPS), “Luas tutupan hutan Indonesia sudah berkurang selama periode 2017—2021 sebesar 956.258 hektare (ha).” Penurunan kualitas udara sebagai salah satu akibat dari hutan yang berkurang dapat mengganggu kesehatan manusia dan pertumbuhan flora dan fauna. Salah satu hal yang menyebabkan luas hutan yang berkurang adalah pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh korporat infrastruktur dilakukan dengan pembukaan lahan. *Stakeholder* perlu mengetahui apa saja dampak yang ditimbulkan korporat terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial beserta penanganannya.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan “Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik” dengan nomor 51/POJK.03/2017 yang salah satu isinya yaitu mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keberlanjutan kepada OJK. Hal ini dilakukan OJK sebagai salah satu upaya untuk menggapai Pembangunan

Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ditargetkan untuk dicapai di tahun 2030. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, dan ekosistem daratan. Pelaporan keberlanjutan adalah praktik organisasi untuk melaporkan secara publik mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan dari segi ekonomi, lingkungan, dan/atau sosial (GRI, 2018). Laporan keberlanjutan atau *sustainability report* menjadi perantara bagi korporat untuk menyampaikan performa organisasi dalam aspek ekonomi, lingkungan dan sosial (Dewi & Pitriasari, 2019).

Pada tahun 2021 terdapat 154 korporat tercatat yang telah mempublikasikan keberlanjutan atau *sustainability report* 2020 melalui sistem SPE-IDXNet, jumlah ini meningkat sebesar 185.2% dibandingkan dengan pelaporan laporan keberlanjutan tahun 2019 yang hanya berjumlah 54 korporat tercatat (www.majalahcsr.id, 2022). Korporat infrastruktur perlu bertanggung jawab dengan menuangkan praktik keberlanjutan yang mereka lakukan ke dalam laporan keberlanjutan, tetapi tidak semua laporan keberlanjutan sesuai dengan indikator keberlanjutan yang diterbitkan OJK atau Global Reporting Initiative (GRI), sehingga, laporan tersebut tidak dapat menggambarkan aktivitas korporat sesungguhnya. Hal ini terlihat dari studi mengenai laporan keberlanjutan emiten tahun 2021 yang dirilis oleh majalah digital *investor.id*, yaitu laporan yang memenuhi kriteria laporan keberlanjutan POJK 51/2017 lebih dari 80% hanya 24% dari 257 laporan (www.investor.id, 2023). Selain itu,

emiten yang mendapat predikat A+ di Indonesia hanya 10 perusahaan dan hanya 15% dari 257 laporan yang mendapatkan pernyataan verifikasi dari pihak independen (www.investor.id, 2023).

Peneliti tertarik mengambil sampel dalam penelitian ini dari korporat infrastruktur karena korporat tersebut belum cukup banyak yang mengimplementasikan keberlanjutan. Hal ini terlihat dari laporan keberlanjutan yang baru sedikit dipublikasikan oleh 62 korporat infrastruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang tercatat. Peneliti menemukan terhitung 20 dari 62 korporat yang mempublikasikan laporan korporat pada tahun 2020 atau dapat dikatakan kurang dari setengah total perusahaan infrastruktur yang tercatat di BEI yang menerbitkan laporan keberlanjutan tahun 2020. Sehingga peneliti akan mengambil data korporat sektor infrastruktur di BEI pada tahun 2020—2022.

Laporan keberlanjutan berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban korporat terhadap *stakeholder*, terutama lingkungan dan masyarakat di mana bisnis tersebut berada. Laporan keberlanjutan juga dapat menaikkan *awareness* para pembacanya mengenai isu keberlanjutan dan langkah yang dilakukan untuk berperan dalam keberlanjutan. Selain itu, laporan keberlanjutan juga berguna bagi korporat untuk menarik investor. Pada masa kini, investor lebih tertarik pada bisnis korporat yang memperhatikan “Prinsip-prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Usaha atau *Environment, Social, and Governance (ESG)*” (www.ekonomi.bisnis.com, 2022). Ketertarikan investor yang meningkat mengenai keberlanjutan menunjukkan bahwa kesadaran investor mengenai

lingkungan dan sosial juga meningkat yang didorong karena sifat manusia yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain dan alam sekitar. Korporat dapat menaikkan nilai korporat bila memikirkan pengembangan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dengan bantuan dari *stakeholder* dari dalam dan luar, misalnya konsumen, karyawan, investor, regulator, pemasok maupun kelompok lainnya (Dewi & Pitriasari, 2019).

Laporan keberlanjutan yang diterbitkan juga perlu untuk diungkapkan sesuai indikator yang ditentukan oleh GRI ataupun OJK. Pengungkapan laporan keberlanjutan yang sesuai dengan indikator berfungsi supaya tujuan yang akan dicapai oleh korporat lebih terarah sehingga menunjukkan kepada pembaca apakah korporat telah melakukan praktik keberlanjutan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pembangunan yang dilakukan atau tidak. Korporat yang melakukan praktik dan pengungkapan keberlanjutan akan mendapat nilai lebih di mata *stakeholder*. Selain itu, keberlanjutan bisnis korporat bergantung pada berjalannya kinerja keuangan serta lingkungan dan sosial yang dilakukan korporat termasuk berpartisipasi nyata mengatasi berbagai tekanan terkait kelestarian dan keseimbangan dalam segi sosial ataupun lingkungan (Imron & Hamidah, 2022). Profit bukanlah satu-satunya hal yang perlu dilihat dalam berbisnis. Apabila korporat hanya memerhatikan profit, maka korporat akan mengabaikan lingkungan dan masyarakat di mana bisnis tersebut berada. Sebuah studi menunjukkan sebuah bisnis dapat menghasilkan situasi ‘*win-win*’ untuk kemajuan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan bila selaras dengan tujuan keberlanjutan (Burritt dan Schaltegger, 2010 dalam Song et al., 2022).

Situasi 'win-win' yang dimaksud yaitu apabila korporat berkomitmen untuk menerapkan tujuan keberlanjutan dalam proses bisnisnya, maka korporat dapat berkontribusi pada kemajuan ekonomi sekaligus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Korporat yang berkomitmen dalam tujuan berkelanjutan dapat menaikkan inovasi dalam proses bisnis mereka, baik dalam hal produksi, promosi, atau yang lainnya. Selain menaikkan inovasi, korporat juga mendapatkan peluang pasar yang baru dan menaikkan reputasi sosial mereka di masyarakat.

Sejumlah faktor yang dinilai dapat memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan, antara lain komite audit, proporsi komisaris independen, kepemilikan saham institusional, ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, likuiditas, implementasi GCG, *leverage*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dewan komisaris independen, konservatisme akuntansi, *financial distress*, ukuran dewan direksi, representasi direksi wanita, mekanisme GCG, struktur kepemilikan, keberagaman jenis kelamin dewan direksi dari sisi direktur wanita, keberagaman jenis kelamin dewan direksi dari sisi direktur laki-laki, *corporate governance efficiency*, kinerja keuangan, dan struktur modal. Peneliti tertarik mengambil *Good Corporate Governance* (GCG) di antara banyak faktor yang telak disebutkan untuk dijadikan sebagai salah satu yang memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan.

Good Corporate Governance (GCG) adalah seperangkat sistem untuk mencapai tujuan korporat yang mengoordinasikan relasi berbagai pihak ataupun

kelompok pemangku kepentingan yang salah satu prinsip dasarnya ialah transparansi (Ardiani et al., 2022). Selain transparansi, GCG memiliki prinsip lainnya, yaitu akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) serta ada pihak yang menjaga prinsip tersebut supaya berjalan, yaitu komite audit, direksi, dan komisaris independen. Tujuan GCG yaitu mengoptimalkan keandalan untuk mengurangi kerugian pemangku kepentingan, mengoptimalkan kapabilitas organisasi, mencegah dan mengurangi kesalahan dan penyelewengan terkait pengelolaan organisasi, menghasilkan nilai lebih bagi seluruh pemangku kepentingan (Njatrijani et al., 2019).

Pengimplementasian prinsip-prinsip GCG menimbulkan dampak bahwa hal yang perlu dipikirkan korporat juga terkait penilaian atas kinerja lingkungan dan sosialnya sehingga bukan hanya keuangannya saja (Tobing et al., 2019). GCG berfokus kepada pihak manajemen yang mempunyai kendali dan kuasa dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil korporat, hal ini mengartikan bahwa hasil keputusan dan kebijakan pihak manajemen adalah setiap informasi yang dikeluarkan oleh korporat (Fatihah & Widiatmoko, 2022). GCG merupakan sistem yang perlu dijalankan korporat untuk memastikan kepentingan terkait dapat terlindungi. Korporat dapat melindungi hak pemangku kepentingan dengan menjalankan praktik keberlanjutan dan mengungkapkan praktik tersebut ke dalam laporan keberlanjutan. Praktik dan pengungkapan keberlanjutan yang dilakukan korporat juga perlu disokong oleh

investor yang memiliki kesadaran dalam keberlanjutan untuk mewujudkan pengungkapan keberlanjutan korporat yang baik.

Tata kelola memiliki beberapa fungsi yang apabila dilaksanakan akan menghasilkan sistem pertanggungjawaban yang baik dari korporat kepada *stakeholder* dan akan menghasilkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara institusi atau lembaga yang termuat dalam struktur tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance* (CG) (Rahardjo, 2018). Menurut Rahardjo (2018), “Fungsi-fungsi tersebut, yaitu pengawasan (*oversight*), kepengurusan (*managerial*), kepatuhan (*compliance*), audit internal (*internal audit*), audit eksternal (*external audit*), *monitoring*, dan kepenasihatian dan institusi atau lembaga yang turut serta dalam CG terdiri dari pemegang saham, *stakeholder* lain, dewan komisaris, direksi, regulator, dan profesi (profesi akuntan, profesi akuntan publik, dan profesi atau lembaga penunjang pasar modal lainnya).”

Peneliti memilih untuk mempergunakan komite audit, direksi, dan komisaris independen sebagai perwakilan CG dikarenakan komite audit dan komisaris independen mewakili fungsi pengawasan dan *monitoring* serta direksi mewakili fungsi kepengurusan. Organ-organ ini merupakan pelaksana langsung dalam korporat, sehingga peneliti ingin mengetahui apakah ukuran komite audit, ukuran direksi, dan ukuran komisaris independen dapat memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan atau tidak. Selain itu, *financial distress* juga dipilih sebagai faktor yang memengaruhi praktik keberlanjutan yang dilakukan korporat tentu berkaitan dengan dana korporat,

sehingga peneliti ingin mengetahui apakah kepelikan keuangan korporat dapat memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan atau tidak.

Faktor pertama perwakilan GCG yang memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan adalah ukuran komite audit. Komite audit sebagai bagian komponen dalam GCG memiliki peranan penting dalam pengungkapan laporan keberlanjutan yang baik. Keberadaan komite audit akan menggiatkan korporat untuk memublikasikan laporan yang berintegritas tinggi dan lengkap sebagai hasil dari perkembangan tuntutan para pemangku kepentingan (Dewi & Pitriasari, 2019). Hal ini dibuktikan dengan penelitian sebelumnya, yaitu adanya pengaruh positif antara komite audit dan pengungkapan laporan keberlanjutan (Mujiani et al., 2021; Saputri et al., 2023; Ardiani et al., 2022; Mujiani & Rohmawati, 2022; Putri & Surifah, 2023). Tetapi berbeda dengan hasil penelitian Yunan et al. (2021) bahwa terdapat pengaruh negatif antara komite audit dan pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan menurut penelitian lainnya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara komite audit dan pengungkapan laporan keberlanjutan (Dewi & Pitriasari, 2019; Tobing et al., 2019; Krisyadi & Elleen, 2020; Yanti, 2023). Kinerja komite audit condong tidak melibatkan diri pada pengungkapan laporan keberlanjutan yang dikarenakan kecondongan komite audit dalam bekerja yaitu pada bagian keuangan dengan melakukan pengendalian dan pengawasan dari dalam dan tidak dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial (Tobing et al., 2019)

Faktor kedua yang memengaruhi pengungkapan keberlanjutan adalah ukuran direksi. Ukuran direksi juga memiliki peran dalam pengungkapan

laporan keberlanjutan. Jumlah direksi yang meningkat membuat korporat akan terisi dengan direksi yang memiliki bermacam-macam pengalaman dan keahlian, sehingga akan menaikkan penyediaan dalam keterbukaan informasi (Serly, 2021). Direksi dapat menetapkan haluan korporat yang dapat memengaruhi kegiatan korporat, salah satunya adalah pengungkapan *sustainability* (Ardiani et al., 2022). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat pengaruh positif signifikan antara ukuran direksi dan pengungkapan sukarela (Serly, 2021) serta antara komite audit dan pengungkapan laporan keberlanjutan (Junggu et al., 2014; Justin & Hadiprajitno, 2019; Herawaty et al., 2021; Euginia & Triwacananingrum, 2022; Anyigbah et al., 2023). Selain itu juga terdapat pengaruh positif signifikan antara dewan direksi dan laporan keberlanjutan (Yanti, 2023). Hanya saja hasil penelitian itu berlawanan dengan penelitian lainnya, yaitu terdapat pengaruh negatif antara ukuran direksi dan pengungkapan *sustainability report* (Hamidah & Arisukma, 2020; Ardiani et al., 2022).

Faktor ketiga yang memengaruhi pengungkapan keberlanjutan adalah ukuran komisaris independen. Pengungkapan informasi yang lebih luas membutuhkan peran komisaris independen. Komisaris independen merupakan supervisi yang secara efektif mengontrol dan mengawasi laporan yang dibuat oleh korporat. Peranan komisaris independen diperlukan untuk pengendalian dari dalam yang baik dalam mengembangkan dan melaksanakan pengungkapan laporan keberlanjutan (Liana, 2019). Demi mengungkapkan informasi laporan keberlanjutan yang lebih luas, komisaris independen diharapkan tidak mendapat

pengaruh dari manajemen. Hal ini dikarenakan komisaris independen bukan termasuk dalam anggota manajemen ataupun memiliki keterkaitan erat dengan korporat. Hal ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu terdapat pengaruh positif antara komisaris independen dan pengungkapan laporan keberlanjutan (Nuraeni & Darsono, 2020; Yunan et al., 2021; Putra et al., 2023). Semakin besarnya jumlah komisaris independen mengakibatkan perluasan informasi yang diungkapkan oleh korporat. Hasil penelitian sebelumnya berbanding terbalik dengan penelitian lainnya, yaitu terdapat pengaruh negatif antara komisaris independen dan pengungkapan *sustainability report* (Michael & Lukman, 2019; Hamidah & Arisukma, 2020) serta antara komisaris independen dan pengungkapan sukarela (Pratiwi & Afriyenti, 2023). Penelitian lainnya menunjukkan tidak ada pengaruh antara komisaris independen dan pengungkapan *sustainability report* (Janggu et al., 2014; Liana, 2019; Tobing et al., 2019; Herawaty et al., 2021; Mujiani et al., 2021; Ardiani et al., 2022).

Faktor keempat yang memengaruhi pengungkapan keberlanjutan adalah *financial distress*. Situasi keuangan suatu korporat juga dapat memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan. *Financial distress* atau kepelikan keuangan merupakan situasi yang terjadi sebelum suatu korporat mengalami kebangkrutan yang sebenarnya atau ketidakanggapan korporat untuk melunasi kewajiban *financial* yang telah habis tempo (Farha et al., 2020). Hal ini membuat korporat harus melakukan perundingan dengan kreditur terkait situasi penangguhan pelunasan utang korporat selama periode restrukturisasi *financial distress* (Audrey & Madyakusumawati, 2019). Menurut Teori Pensinyalan, saat

korporat dalam keadaan *financial distress* atau keuangan yang sulit akan memiliki kecondongan untuk melakukan pengurangan informasi laporan tahunan korporat yang akan diberikan kepada publik (Serly, 2021). Selain laporan tahunan, korporat juga akan memberikan informasi yang sedikit pada laporan keberlanjutannya. Berdasarkan Farha et al. (2020), terdapat pengaruh negatif signifikan antara *financial distress* dan pengungkapan laporan keberlanjutan. Penelitian tersebut disokong oleh penelitian lainnya yaitu terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara *financial distress* dan pengungkapan sukarela (Immanuel & Muid, 2015; Serly, 2021; Fikarunia & Ferdiansyah, 2022). Sebaliknya, hasil penelitian lain membuktikan tidak terdapat pengaruh antara *financial distress* dan luas pengungkapan sukarela (Vernando & Halmawati, 2016; Kartika et al., 2021). Penelitian lainnya memperlihatkan terdapat pengaruh positif signifikan antara *financial distress* dan luas pengungkapan sukarela (Pratiwi & Afriyenti, 2023).

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan mengenai pentingnya praktik pengungkapan laporan keberlanjutan oleh korporat infrastruktur dan hasil dari penelitian terdahulu, terdapat *gap* berupa kontradiksi hasil penelitian terdahulu dan *less studied* atau penelitian yang masih minim dilakukan. Variabel ukuran komite audit, ukuran direksi, ukuran komisaris independen, dan *financial distress* memiliki hasil yang kontradiksi pada penelitian terdahulu serta variabel *financial distress* masih belum terlalu banyak diuji perannya terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Oleh karena itu, peneliti

melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Financial Distress* terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan.**”

1.2 Pertanyaan Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan pengaruh ukuran komite audit, ukuran direksi, ukuran komisaris independen, dan *financial distress* terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Pada penelitian terdahulu terdapat hasil yang kontradiksi, yaitu pada variabel ukuran komite audit, ukuran direksi, dan ukuran komisaris independen serta masih sedikitnya penelitian yang membuktikan peran *financial distress* terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian mengenai “Pengaruh ukuran komite audit, ukuran direksi, ukuran komisaris independen, dan *financial distress* terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan,” sebagai berikut.

1. Apakah ukuran komite audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan?
2. Apakah ukuran direksi memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan?
3. Apakah ukuran komisaris independen memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan?
4. Apakah *financial distress* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.
2. Menganalisis pengaruh ukuran direksi terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.
3. Menganalisis pengaruh ukuran komisaris independen terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.
4. Menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang akuntansi lingkungan. Teori pendukung dalam penelitian ini ada dua, yaitu Teori *Stakeholder* dan Teori Pensinyalan. Teori *Stakeholder* yang memastikan korporat memberikan manfaat dengan menyampaikan informasi yang berkualitas supaya korporat dapat dipercaya oleh *stakeholder*. Teori Pensinyalan yang menekankan bahwa korporat mengeluarkan informasi penting untuk pihak luar korporat dalam mengambil keputusan investasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil mengenai pengaruh ukuran komite audit,

ukuran direksi, ukuran komisaris independen, dan *financial distress* terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

1.4.2 Manfaat praktis

a. Bagi korporat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi korporat-korporat dari berbagai sektor terutama bagi sektor infrastruktur mengenai pentingnya pengungkapan laporan keberlanjutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan, sehingga laporan keberlanjutan yang diungkapkan ke depannya dapat menjadi lebih baik.

b. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat menaikkan *awareness* investor mengenai isu keberlanjutan dan memberikan informasi bagi investor mengenai pentingnya pengungkapan laporan keberlanjutan yang baik sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan keputusan investasi terhadap korporat.